BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola Penanaman Nilai-Nilai Ideologi

Pola adalah bentuk atau model (lebih abstrak, suatu set peraturan) yang biasa dipakai dalam interaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Pola adalah gambar yang dibuat contoh/model ataupun bentuk (struktur) yang tetap.[1] untuk Penanaman merupakan sebuah proses yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosialisasi. Sosialisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menanamkan nilai-nilai yang ingin di transferkan dalam pribadi atau individu.

Nilai (value) berasal dari bahasa latin valere yang artinya kuat,baik dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai "keberhargaan" (worth) atau "kebaikan" (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang di inginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang di percayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (*dictionary of sociology an related science*). Nilai itu yang melekat pada suatu objek.[2]

Ada bermacam teori tentang nilai. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya, dan dapat dikelompokkan enjadi empat tingkatan, yaitu:

[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[2] Yuyus kardiman dkk, *pendidikan kewarganegaraan* (jakarta:Hartono Media Pustaka Februari 2013)

1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
2. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.
3. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistege werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
4. Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.(Driyakarya,1978)
5. Nilai-nilai estetis: nilai-nilai dalam alam dan karya seni
6. Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
7. Nilai-nilai keagamaan

Walter G.Everet menggolongkan nilai-nilai manusia kedalam delapan kelompok:

1. Nilai-nilai ekonomis ditunjukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli
2. Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan

3. Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan
4. Nilai-nilai sosial: berasal dari berbagai bentuk perserikatan manusia
5. Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang di inginkan.[3]

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

A. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
B. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas
C. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:
    - Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
    - Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetic,rasa) manusia.
    - Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia
    - Nilai Religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religious ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

[3] Ibid.

Ideologi adalah suatu perumusan gagasan yang tegas dan jelas mengenai asas-asas serta nilai-nilai dalam kehidupan yang diyakini bersama untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara,berbangsa dan bermasyarakat.[4] Jadi,Ideologi adalah dasar, patokan, pegangan yang diyakini untuk bersama-sama mengarahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai "tujuan".

C.C Rodee dan kawan-kawan membagi ideologi atas 6 (enam) ragam yang digolongkan pula kedalam dua perumusan. Yaitu, bahwa ada "ideologi kiri" (ideologies on the left) dan "ideology tengah dan kanan (ideologies of the center and right).

Ideologi kiri terdiri dari ragam ideologi sebagai berikut:

1. Anarkisme (Anarchism)
2. Komunisme (communism)
3. Sosialisme (socialism)

Ideologi tengah dan kanan terdiri dari ragam ideologi sebagai berikut:

1. Liberalisme (liberalism)
2. Konservatisme (conservatism)
3. Fasisme (Fascism)

Fungsi-Fungsi ideologi dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Etika bagi pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan Negara.
2. Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa
3. Asas yang harus di taati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dengan (rakyat) yang diperintah. (Jika terdapat penyimpangan dalam hal ini, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan itu).
4. Penegasan bagi fungsi Negara yang diemban oleh pemerintah.
5. Pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik.

[4] T. May Rudy. *Pengantar ilmu politik* (Jakarta: PT Refika Aditama,2011) hal. 75

Ideologi berasal dari kata Yunani Idein, yang berarti melihat, atau Idea yang berarti rawut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan Logia yang berarti ajaran. Dengan demikian Ideologi ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran (science des ideas).[5]

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

Beberapa pengertian ideologi:

1. A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan dan agama.
3. Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman cita-cita hidup
4. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka.

    - Ideologi tertutup,merupakan suatu system pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok

[5] Ibid hal 76

orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat atas nama ideology dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.

- Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral masyarakat itu sendiri, dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari consensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.[6]

Terkait dengan pemikiran, ide, nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat maka itulah yang disebut dengan ideologi. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar, cita-cita, nilai dasar dan keyakinan yang di junjung tinggi. Ideologi memberikan kepada penganutnya suatu gambaran mengenai dunia, baik sebagaimana adanya maupun seharusnya.

Sargent (1984) menyatakan ideologi adalah suatu sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu.[7] Ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan, dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang

[6] Yuyus kardiman dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Hartomo Medika Pustaka,Februari 2013). hal 24
[7] Leo Agung, *sejarah intelektual* (Yogyakarta : Penerbit Ombak (Anggota IKAPI) 2013). Hal 4

sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. Ideologi merupakan seperangkat tata nilai yang tersusun secara sistematis, bulat dan utuh. Demikian pula ideologi mengandung :

A. Asumsi yaitu pandangan umum tentang apa yang dianggapnya baik yang didukung, dianut dan dijunjung tinggi;
B. Kaidah yaitu rincian dari asumsi yang menjadi pegangan atau pedoman;
C. Organisasi yaitu penerapan rincian nilai kedalam tindakan yang menyangkut kebersamaan tindakan; ideologi sebagai belief system mengandung unsur kepentingan, interes dan cita-cita.[8]

Di Indonesia, ideologi sebagai "pedoman perjuangan atau pegangan perjuangan", terkandung aspek ajaran yang terkait dengan aksi, pergerakan, kepentingan, dan cita-cita. Ideologi mempunyai fungsi yaitu :

A. Sebagai dasar dan kerangka bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Sebagai pemberi arah dan tujuan bagi pengaharapan, pemikiran dan kegiatan bersama dari semua unsur yang ada dalam masyarakat suatu negara.
C. Pengikat suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai cita-cita bersama.
D. Menjadi sumber inspirasi yang mampu menyemangati serta mendorong masyarakat suatu bangsa untuk mencapai tujuan.
E. Bekal untuk menentukan jati diri suatu bangsa.

[8] Ibid 5

Ideologi mempunyai tiga dimensi, sebagai berikut :

A. Dimensi Realita: mencerminkan gagasan yang hidup dalam masyarakat. Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung didalam dirinya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup didalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi tersebut lahir sehingga mereka benar-benar merasakan dan mengahayatinya sebagai milik mereka.
B. Dimensi Idealis: memiliki cita-cita yang tahan uji. Melalui idealisme atau cita-cita yang terkandung di dalam ideologi yang dihayati suatau masyarakat atau bangsa dapat mengetahui kearah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Idealisme tersebut seyogyanya berisi harapan-harapan yang masuk akal dan dapat direalisasikan.
C. Dimensi Fleksibilitas: dapat menyesuaikan diri, beradaptasi dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dimensi ini hanya dapat dimiliki oleh suatu ideologi yang terbuka karena dengan ideologi terbuka dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.[9]

Jadi ideologi adalah keseluruhan sistem ide atau gagasan yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, dan pedoman tingkah laku seseorang atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan yang dicita-citakan.

[9] Leo Agung, *sejarah intelektual* (Yogyakarta : Penerbit Ombak (Anggota IKAPI) 2013). Hal 7

B. Partai Politik

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organiasasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.[10]

Secara umum partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan kebijakan mereka.[11] Karena itu, "Partai Politik" dalam pengertian modern dapat didefisinikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Batasan lengkap dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, menurutnya partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan idiologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan".[12]

Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang meng hubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.

---

[10] Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996.
[11] Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai*. Jakarta : PT Gramedia, 1981, hlm. 14
[12] Ichlasul Amal, *Op.Cit.*

Partai politik pada dasarnya adalah sebuah lembaga, atau organisasi. Sebuah organisasi tentunya memiliki tujuan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan programnya.[13]

Sigmund Neumann dalam karangannya "modern political parties" mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

B.1 Fungsi Partai Politik

Dalam Negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Salah satu sebagai sarana komunikasi politik

   Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat yang mengaturnya sendiri sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarkat yang luas pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak bergabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (interest aggregation). Sesudah di gabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan

[13] Mirriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu politik,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hal.403-404

dirumuskan dalam bentuk yang teratur.proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (interest articulation).

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

   Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (intrumen of political socialization). Didalam politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat dimana ia berada.biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-hejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisapasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupaun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik.

> Menurut Michael Rush dan Philip Althoff sosialisasi politik adalah "suatu proses dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang menjelaskan pemerintahan". [14]

Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah melatih individu dan memelihara sistem politik.

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik ataupun memilih dalam pemilihan umum.

Terlaksananya sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui dimana individu menerima rangsangan-rangsangan politik.

---

[14] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 153

3. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik

Partai politik juga mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Rekruitmen politik merupakan fungsi yang berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.[15]

Rekruitmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekruitmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Ini semua sangat bergantung pada pola-pola atau mekanisme rekruitmen yang digunakan.[16]

Rekruitmen politik,di mana pun, memiliki pola yang serupa tapi tak sama. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekruitmen politik yaitu :

[15] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka;2010), hlm. 408
[16] Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia;2011), hlm. 128

1. Rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.
2. Pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat.
3. Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai politik menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang di tempuh arah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagi masa depan politik.[17]

Kaderisasi adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Bergeraknya sebuah organisasi juga di tentukan oleh baik atau tidaknya kaderisasi. Apabila organisasi hadir tanpa adanya proses kaderisasi, akan sulit terbangun organisasi yang dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keharusan dan kewajiban di dalam sebuah organisasi, karena kaderisasi adalah tempat membangun struktur organisasi.[18]

Kader diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang jabatan atau pekerjaan penting di pemerintahan, partai dan lain-lain. Sedangkan pengkaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kaderisasi kepemimpinan berarti proses mempersiapkan seseorang

[17] Ibid hal 128
[18] Veithzal Rivai, kepemimpinan dan perilaku organisasi, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 83

untuk menjadi pemimpin pengganti di masa depan, yang akan memeikul tanggung jawab penting di lingkungan suatu organisasi. Sebuah kepemimpinan niscaya akan ada titik akhirnya. Artinya seseorang pemimpin suatu saat pasti akan berakhir masa kepemimpinannya dan ketika masa kepemimpinannya berakhir inilah di perlukan sosok-sosok baru pengganti pemimpin tersebut. Maka disadari atau tidak dengan sendirinya proses kaderisasi itu menjadi sebuah hal yang sangat di perlukan. Ketersediaan jumlah calon pemimpin di sertakan dengan kualitas kepemimpinan yang baik di tentukan dari bagaimana kaderisasi yang di terapkan sebuah organisasi. Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi itu terdiri dari dua macam yaitu:

1. Kaderisasi informal

   Kaderisasi informal bisa diartikan sebagai proses kaderisasi yang dilakukan secara tidak berstuktur, tidak berencana, tidak sistematis, serta tidak melalui kelembagaan. Tetapi dalam kaderisasi informal tetep ada indikator-indikator atau kriteria-kriteria seorang calon pemimpin.
2. Kaderisasi formal adalah proses kaderisasi yang tersusun secara sistematis, berstuktur, serta telah di rencanakan melalui kelembagaan. Karena itu sebauah oeganisasi memiliki sebuah rencana strategis terkait kaderisasi yang aKan dilakukannya. Di dalam buku *kepemimpinan dan perilaku organisasi* karangan Veithzal Rivai di jelaskan bahwa kaderisasi formal dapat menjadi dua macam, kaderisasi formal secara intern dan ekstern. Kaderisasi intern dapat di tempuh dengan cara seperti pemeberian jabatan, pemberian tugas atau mengadakan sebuah pelatihan-pelatihan.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.[19]

C. Kesadaran Politik

Surbakti mengatakan kesadaraan politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.[20] Melihat dari pengertian kesadaran politik di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi ciri-ciri seseorang yang sadar dalam berpolitik antara lain: (a) Mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara, (b) Berperan serta dalam menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik dan (c) Mempunyai minat dan perhatian seorang warga terhadap lingkungan masyrakat dan politik. Aktivitas yang mempengaruhi adanya kesadaraan politik antara lain adalah pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.

Kesadaran politik memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan konsep kemampuan politik. Kemampuan politik adalah salah satu hasil keluaran yang dapat diperoleh dari sosialisasi politik, yaitu suatu gambaran bahwa seseorang menilai dirinya dapat memengaruhi proses keputusan politik pemerintah.

---

[19] Ibid

[20] Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h. 144

Terdapat beberapa macam kesadaran (*awareness*) berdasarkan sumber awal datangnya kesadaran tersebut, yaitu: [21]

1. *Autonomous*, yaitu kesadaran yang bersumber dari diri sendiri. Orang yang memiliki keasadaran politik seperti ini tidak perlu diintimidasi atau diintervensi oleh orang lain. Inilah macam kesadaran yang paling ideal.
2. *Sosionomous*, yaitu kesadaran yang muncul karena adanya intervensi dari orang lain atau kelompok tertentu.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran politik seseorang memang berbeda-beda. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang, seperti:

1. Banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya.
2. Adanya minat dan perhatian terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.
3. Baik buruknya penilaian dan apresiasi yang ia miliki kepada pemerintah, baik terhadap kebijakan yang ditekankan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya.

Gambaran umum mengukur dimensi kesadaran politik seseorang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Mengikuti segala kegiatan pemerintah.
2. Mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui media.

---

[21] Idrus Affandi dan Leni Anggraeni, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Lensa Media Pustaka Indonesia, 2011), h. 30

Namun tentu saja faktor-faktor yang disebutkan di atas hanyalah sekedar gambaran saja, karena masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran politik seseorang. Misalnya ekonomi, status seseorang di masyarakat, termasuk apakah orang terbut mempunyai jabatan atau kedudukan di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian yang di maksud dengan pola penanaman nilai-nilai ideologi partai pada kader PDIP adalah suatu bentuk yang tersusun secara sistematis dalam penanaman nilai-nilai ideologi terhadap kader partai sebagai dasar perjuangan partai dan kadernya dalam sistem politik Indonesia.